

**ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI KABUPATEN TULANGBAWANG**

(Skripsi)

**KHANSA NABILA
NPM. 2113034056**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI KABUPATEN TULANGBAWANG**

Oleh

KHANSA NABILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI KABUPATEN TULANGBAWANG

Oleh

KHANSA NABILA

Pemerataan akses pendidikan sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Tulangbawang saat ini masih menghadapi disparitas dalam distribusi fasilitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar negeri. Berdasarkan standar yang digunakan yaitu SNI 03-1733-2004 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulangbawang secara umum mengalami kekurangan jumlah sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan survei laman internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data sekunder dan analisis spasial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketersediaan jumlah sekolah *existing* SD berjumlah 158 sekolah dan ketersediaan jumlah sekolah *existing* SMP berjumlah 55 sekolah (2) berdasarkan acuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan standar fasilitas SD yaitu 280 sekolah dan 98 sekolah untuk fasilitas SMP (3) persentase luas permukiman terjangkau fasilitas SD sebesar 50,09% dan 12,22% untuk fasilitas SMP (4) Kabupaten Tulangbawang memiliki topografi yang datar hingga bergelombang. Kondisi fisik wilayah seperti topografi dan bentuk lahan, mempengaruhi distribusi sekolah dasar.

Kata kunci: ketersediaan, keterjangkauan, pendidikan dasar, negeri

ABSTRACT

ANALYSIS OF AVAILABILITY AND RANGE OF STATE PRIMARY EDUCATION IN TULANGBAWANG REGENCY

By

KHANSA NABILA

Equal access to education is very important in order to improve the quality of human resources. Tulangbawang regency is currently still encounter disparities in the distribution of educational facilities, state primary education. Based on the standards used, SNI 03-1733-2004, it indicates that Tulangbawang Regency generally undergoes a shortage of schools. This study aims to analyze the availability and range of state primary education in Tulangbawang Regency. The approach used in this study is descriptive methods, data collection methods were carried out using documentation and internet page surveys. The data analysis techniques used are secondary data analysis and spatial analysis. The results of the study show that (1) the availability of the number of existing elementary schools is 158 schools and the availability of the number of existing junior high schools is 55 schools (2) based on SNI 03-1733-2004 concerning procedures for planning housing environments in urban areas, the standard for elementary school facilities is 280 schools and 98 schools for junior high school facilities (3) the percentage of residential areas range to elementary school facilities is 50,09% and 12,22% for junior high school facilities (4) Tulangbawang Regency has a flat to undulating topography, the physical conditions of the area such as topography and land form affect the distribution of primary schools.

Key words: availability, range, state primary education.

Judul Skripsi : **ANALISIS KETERSEDIAAN DAN
KETERJANGKAUAN PENDIDIKAN
DASAR NEGERI DI KABUPATEN
TULANGBAWANG**

Nama Mahasiswa : **Khansa Nabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2113034056**

Program Studi : **Pendidikan Geografi**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Rahma Kurnia S.U, S.Si., M.Pd.
NIP 19820905 200604 2 001

Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.
NIP 19891106 201903 2 013

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Program Studi
Pendidikan Geografi,

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.
NIP 19750517 200501 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rahma Kurnia S.U, S.Si., M.Pd.**

Sekretaris : **Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.**

Penguji : **Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP. 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khansa Nabila
NPM : 2113034056
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP
Alamat : Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulangbawang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang” dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025



Khansa Nabila

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Khansa Nabila dilahirkan di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 09 Maret 2003 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Suprpto dan Ibu Mukirah.

Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Raudhatul Athfal (RA) di RA Nurul Iman pada tahun 2007-2009, Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman pada tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2015-2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2018-2021. Kemudian pada tahun 2021, diterima menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Forum Pengkajian dan Pembinaan Islam (FPPI FKIP) Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). KKN di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar pada Bulan Januari sampai Bulan Februari 2024, untuk PLP di SMA Mutiara Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 1 di Lampung Barat, kemudian pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 2 dan 3. KKL 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan KKL 3 di Kalianda.

MOTTO

“If you cannot be intelligent be a good person”

“Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir”

(Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah robbil alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring do'a, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Ku persembahkan karya berharga ini sebagai tanda bakti dan cintaku yang tulus untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam hidupku.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak Suprpto dan Ibu Mukirah

Orang tuaku tersayang yang telah merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, serta selalu mengiringi langkahku dengan do'a dalam setiap sujudnya. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan kesehatan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membahagiakan kalian.

Para Pendidik

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, keluarga besar serta sahabat tercinta yang selalu memberikan arahan, dukungan dan do'anya.

Serta

Almamater tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah subhānahu wata‘ālā karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Rahma Kurnia Sri Utami, S.Si., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk terselesaikannya skripsi ini. Tidak ada yang dapat diberikan kepada beliau, kecuali do’a yang tulus dan ikhlas.

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan FKIP Unila.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Unila.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Unila.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Unila.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila.

6. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unila.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unila, terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat yang dapat menjadi bekal penulis kedepannya.
8. Seluruh Staf Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unila yang telah memberikan arahan dan pelayanan administrasi selama menyelesaikan studi.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulangbawang atas pemberian izin, bantuan dan kerjasama kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Kedua orang tuaku Bapak Suprpto dan Ibu Mukirah, terima kasih atas do'a dan pengorbanannya selama ini.
11. Adikku Muhammad Sabiq Al Mufarid, terima kasih karena selalu siap membantuku, dan sebagai tempat berbagi cerita.
12. Mas Rendy Arya Wibisana, terima kasih untuk selalu ada di setiap langkah perjalanan ini.
13. Sahabat yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi dan selama menjalani pendidikan (Tiara Eka Putri & Dewi Damayanti).
14. Sahabat seperjuangan Pendidikan Geografi angkatan 2021 atas bantuan, dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
15. Kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Akhirnya, besar harapan dari penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025
Penulis,

Khansa Nabila

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Rumusan Masalah.....	4
1.5. Tujuan Penelitian.....	5
1.6. Manfaat Penelitian.....	5
1.7. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Konsep Dasar Pendidikan.....	7
2.2. Pendidikan Dasar.....	8
2.3. Teori tentang Sistem Informasi Geografis (SIG).....	9
2.4. Teori tentang Pemodelan Spasial (<i>Buffer</i>).....	10
2.5. Konsep Teori Lokasi (<i>Central Place Teory</i>).....	11
2.6. Standar Fasilitas Pendidikan di Indonesia.....	12
2.7. Penelitian yang Relevan.....	16
2.8. Kerangka Pikir.....	19
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Metode Penelitian.....	20
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian.....	20
3.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24

3.5. Teknik Analisis Data.....	24
3.6. Diagram Alir Penelitian.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	28
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Tulangbawang.....	28
4.1.2. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian.....	29
4.1.3. Keadaan Penduduk.....	31
4.2. Hasil Penelitian.....	33
4.2.1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	33
4.2.2. Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	38
4.3. Deskripsi Pembahasan.....	52
4.3.1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	52
4.3.2. Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	53
4.3.3. Keterkaitan dengan Regulasi Pemerintah tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	54
4.3.4. Implikasi terhadap Pemerataan Layanan Pendidikan.....	57
4.3.5. Temuan Penelitian.....	59
V. PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk dan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024.....	3
2.1 Penelitian yang Relevan.....	17
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2 Kebutuhan Data Sekunder.....	25
4.1 Kondisi Demografis Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024.....	32
4.2 Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri SD.....	33
4.3 Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri SMP.....	37
4.4 Jangkauan Fasilitas SD Negeri terhadap Luas Permukiman dengan Radius Tertentu di Kabupaten Tulangbawang.....	44
4.5 Jangkauan Fasilitas SMP Negeri terhadap Luas Permukiman dengan Radius Tertentu di Kabupaten Tulangbawang.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Konsep <i>Threshold</i> dan <i>Range</i>	12
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	19
3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulangbawang.....	21
3.2 Diagram Alir Penelitian.....	27
4.1 Peta Tingkat Pemenuhan SD Negeri Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	35
4.2 Peta Tingkat Pemenuhan SMP Negeri Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	38
4.3 Peta Sebaran SD Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	40
4.4 Peta Sebaran SMP Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	42
4.5 Peta Keterjangkauan SD Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	46
4.6 Peta Keterjangkauan SMP Negeri di Kabupaten Tulangbawang.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan.....	70
2. Surat Balasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang.....	71
3. Dokumentasi Penelitian.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam perkembangan intelektual, emosional, dan sosial seorang anak (Putri, 2023). Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak usia sekolah di Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dasar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan dasar sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah melalui program wajib belajar 9 tahun, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang mencakup jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (Pranowo dkk., 2023).

Dasar hukum dari program ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang memperjelas tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan dan perluasan akses pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Untuk mendukung program ini, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada daerah terpencil dan kurang berkembang, salah satunya dengan mengirimkan guru ke wilayah tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati haknya

atas pendidikan yang layak, sebagai langkah awal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945 (Hardisanti & Trihantoyo, 2021).

Kabupaten Tulangbawang merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Lampung. Posisi geografis Kabupaten Tulangbawang berada di bagian timur Provinsi Lampung, berbatasan dengan laut lepas (Laut Jawa), dan menjadi hilir Way Tulangbawang, memiliki topografi dari datar hingga bergelombang. Dengan jumlah penduduk mencapai 436.038 jiwa dan luas wilayah 3.466,32 km², kabupaten ini memiliki tingkat kepadatan 125,08 jiwa/km² (BPS Kabupaten Tulangbawang, 2023). Secara demografis, kabupaten ini memiliki populasi yang cukup heterogen, dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam.

Permasalahan pendidikan dasar di daerah ini tidak hanya mencakup persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata, namun juga menyangkut ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Misalnya, Kecamatan Banjar Agung dengan 45.435 penduduk memiliki 14 SD dan 3 SMP, sedangkan Kecamatan Rawajitu Timur yang berpenduduk 15.021 hanya memiliki 9 SD dan 2 SMP. Perbedaan ini menunjukkan bahwa distribusi sekolah belum disesuaikan secara proporsional dengan distribusi penduduk, sehingga dapat menimbulkan keterbatasan akses pendidikan, terutama pada wilayah berpenduduk padat.

Penelitian ini berfokus pada sekolah dasar negeri karena merupakan jenjang awal pendidikan formal yang bersifat wajib sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, keberadaan sekolah dasar menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat keterjangkauan dan kecukupan jumlah sekolah yang ada saat ini di Kabupaten Tulangbawang, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan penyediaan sarana pendidikan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Fasilitas Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Tulangbawang Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sekolah <i>Existing</i> SD	Sekolah <i>Existing</i> SMP
1.	Banjar Agung	45.435	14	3
2.	Banjar Baru	15.968	8	3
3.	Banjar Margo	42.321	14	3
4.	Dente Teladas	55.222	9	8
5.	Gedung Aji	14.927	8	1
6.	Gedung Aji Baru	25.823	14	2
7.	Gedung Meneng	31.624	10	6
8.	Menggala	52.416	16	4
9.	Menggala Timur	15.671	6	4
10.	Meraksa Aji	16.278	8	3
11.	Penawar Aji	21.533	11	2
12.	Penawartama	32.999	15	3
13.	Rawajitu Selatan	32.059	11	2
14.	Rawajitu Timur	15.021	9	5
15.	Rawapitu	18.741	5	4
Jumlah		436.038	158	50

Sumber: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024
2. BPS Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada data dan informasi yang tersedia, persebaran fasilitas pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang menunjukkan ketidakseimbangan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, radius pelayanan fasilitas pendidikan dasar (SD dan SMP) maksimal adalah 1000 meter dari permukiman penduduk. Standar ini bertujuan agar siswa dapat menjangkau sekolah dengan berjalan kaki tanpa hambatan berarti. Namun demikian, pada kenyataannya, persebaran sekolah di Kabupaten Tulangbawang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan ini. Hal tersebut terlihat dari ketidakseimbangan jumlah sekolah di setiap kecamatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Sebagai contoh, Kecamatan Dente Teladas memiliki jumlah penduduk mencapai 55.222 jiwa tetapi hanya memiliki 9 SD dan 4 SMP, sementara Kecamatan Banjar Baru dengan 15.968 penduduk memiliki 8 SD dan 3 SMP. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa secara spasial dan fungsional, banyak wilayah yang kemungkinan besar berada di luar radius 1000 meter dari fasilitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang jelas mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Tulangbawang serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memenuhi ketersediaan pendidikan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan secara merata.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan jumlah sekolah dasar dan menengah pertama negeri di Kabupaten Tulangbawang belum disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk tiap kecamatan.
2. Persebaran fasilitas pendidikan dasar negeri yang belum merata.
3. Keterjangkauan fasilitas pendidikan terhadap permukiman belum di analisis berdasarkan standar radius maksimum 1.000 meter sebagaimana ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana standar jumlah fasilitas pendidikan dasar negeri di Kabupaten

Tulangbawang berdasarkan SNI 03-1733-2004?

2. Bagaimana sebaran spasial fasilitas pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang?
3. Bagaimana tingkat keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar negeri terhadap wilayah permukiman di Kabupaten Tulangbawang berdasarkan jarak layanan minimum dalam SNI 03-1733-2004?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis standar jumlah fasilitas pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang berdasarkan SNI 03-1733-2004.
2. Menganalisis sebaran spasial fasilitas pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang.
3. Menganalisis keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar negeri terhadap wilayah permukiman di Kabupaten Tulangbawang berdasarkan kriteria jarak tempuh pelayanan dalam SNI 03-1733-2004.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis penelitian ini menjadi sarana untuk mengasah keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) sebagai alat analisis untuk perencanaan wilayah dan evaluasi pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan, sekaligus memperluas wawasan mengenai ketimpangan distribusi pendidikan dasar di daerah tertentu.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau data dasar bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pemerataan dan keterjangkauan pendidikan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran geografi di SMA kelas XII semester 1 pada pokok bahasan geografi manusia, khususnya pada materi perencanaan wilayah.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi spasial yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), dalam menyusun kebijakan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dijadikan sebagai batasan dan pemberi arahan yang jelas sebagai berikut:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah pelayanan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang.
2. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kabupaten Tulangbawang.
3. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2024/2025.
4. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah geografi regional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Pendidikan sebagai usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa (Ung dkk., 2017). Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Atas dasar pemikiran itu, pendidikan berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang (Darmawati dkk., 2013).

Pemahaman terhadap istilah-istilah dasar dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman konsep. Dua istilah yang sering digunakan namun sering kali dianggap sama adalah pedagogi dan pedagogik. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda dan saling melengkapi dalam ranah keilmuan pendidikan. Pedagogi secara umum berarti “pendidikan” itu sendiri, sedangkan pedagogik mengacu pada “ilmu pendidikan” atau teori dan praktik yang mendasari kegiatan mendidik.

Secara etimologis, istilah pedagogi berasal dari kata *paidagogos*, yang pada awalnya berarti pelayan namun berkembang menjadi makna yang lebih mulia, yaitu orang yang membimbing anak menuju kemandirian dan tanggung jawab (Rahman dkk., 2022). Memahami perbedaan ini penting sebagai dasar berpikir dalam membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk dalam merumuskan kebijakan, pendekatan pengajaran, dan pengembangan kurikulum. Dengan demikian, kejelasan konsep antara pedagogi dan pedagogik menjadi landasan awal dalam menyusun analisis pendidikan yang lebih komprehensif dan ilmiah.

2.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi diri, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Di era kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, setiap individu dituntut untuk adaptif terhadap berbagai perubahan. Semakin cepat perubahan terjadi, maka semakin penting pula peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas (Herlina dkk., 2024). Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap warga negara untuk menempuh pendidikan dasar minimal 9 tahun, yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Firmansyah, 2013). Tingkat pendidikan di Indonesia secara formal telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal, sedangkan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. Pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta-fakta dalam pergeleran obyektifitas di alam ini. Maka dalam pendidikan dasar, orang tua tidak boleh bertengkar atau berbuat apa saja yang belum pantas diketahui oleh anak, sebab hal itu akan merusak sistem dan suasana hati yang sedang dibangun, karena alam ini tertib, maka rumah tangga serta lingkungannya harus tertib (Wahidah & Adhar, 2024). Orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus membimbing dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang baik dan mendidik. Adapun tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar ini adalah ditekankan pada peletakan dasar pengetahuan dan keterampilan dimana pada tingkat ini siswa atau anak hanya menangkap dan mengelola fakta-fakta yang ada.

2.3 Teori tentang Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menangani data yang secara spasial bereferensi pada permukaan bumi. SIG digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data geospasial atau data yang memiliki informasi lokasi. Menurut Burrough dan McDonnell (1998), SIG merupakan perangkat lunak yang memiliki kemampuan dalam menghubungkan data spasial (peta digital) dengan data atribut (informasi non-spasial), sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. SIG memungkinkan pengguna untuk melihat, memahami, menafsirkan, dan memvisualisasikan data

dalam berbagai cara yang mengungkap hubungan, pola, dan tren dalam bentuk peta, grafik, laporan, dan gambar.

Konteks perencanaan wilayah dan analisis pelayanan publik menempatkan SIG sebagai alat bantu utama untuk mengidentifikasi ketimpangan persebaran fasilitas, memetakan wilayah-wilayah tertinggal, serta mengevaluasi kebutuhan pembangunan berdasarkan distribusi penduduk dan infrastruktur. Kemampuan SIG untuk mengelola data spasial dan melakukan pemodelan secara analitis membuatnya sangat efektif digunakan dalam kajian sektor pendidikan, termasuk dalam menganalisis keterjangkauan dan distribusi sekolah. Melalui integrasi data spasial dengan informasi demografis, SIG dapat memberikan representasi yang objektif dan akurat mengenai kondisi riil suatu wilayah, sehingga mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data.

2.4 Teori tentang Pemodelan Spasial (*Buffer*)

Salah satu teknik analisis dalam SIG yang umum digunakan dalam studi keterjangkauan fasilitas adalah pemodelan spasial *buffer*. *Buffer* merupakan suatu zona atau area yang dibentuk dengan jarak tertentu dari suatu fitur spasial (titik, garis, atau area), yang merepresentasikan area pengaruh atau jangkauan dari fitur tersebut. *Buffer* dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu titik lokasi (misalnya rumah penduduk) berada dalam radius tertentu dari fasilitas umum, sehingga dapat dijangkau secara efektif.

Konteks pendidikan memanfaatkan *buffer* untuk mengetahui keterjangkauan geografis siswa terhadap sekolah, berdasarkan batas maksimum jarak pelayanan yang telah ditentukan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, fasilitas pendidikan dasar (SD dan SMP) idealnya berada dalam radius 1.000 meter dari kawasan permukiman, agar dapat diakses dengan berjalan kaki oleh siswa tanpa hambatan berarti. Dengan menggunakan analisis *buffer*, dapat dibuat zona sejauh 1.000 meter dari setiap sekolah, lalu dilakukan *overlay* dengan data permukiman untuk mengetahui apakah seluruh penduduk telah terlayani atau belum. Teknik ini memberikan informasi spasial yang penting untuk mengevaluasi pemerataan

fasilitas pendidikan serta memberikan rekomendasi perencanaan penambahan sekolah baru di wilayah yang belum terjangkau. Oleh karena itu, *buffer* bukan hanya berfungsi sebagai alat analisis teknis, tetapi juga mendukung upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dalam penyediaan layanan pendidikan.

2.5 Konsep Teori Lokasi (*Central Place Theory*)

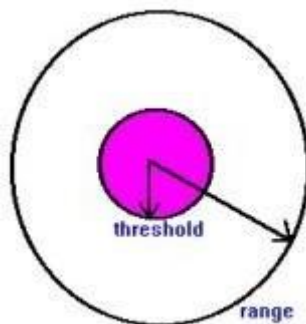
Pemahaman terhadap pola penyebaran dan keterjangkauan suatu layanan atau fasilitas memerlukan pertimbangan terhadap teori-teori yang menjelaskan hubungan spasial antara pusat kegiatan dan wilayah di sekitarnya. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam kajian tata ruang dan struktur wilayah adalah *Central Place Theory*.

Konsep *Central Place Theory* pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi dan ekonomi asal Jerman, pada tahun 1933. Teori ini menjelaskan sistem perkotaan yang tersusun atas pusat-pusat pelayanan dengan ukuran yang berbeda-beda. Elemen utama dalam setiap model *central place* adalah konfigurasi spasial ketersediaan pelayanan individu, yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana pusat-pusat aktivitas terbentuk dan melayani daerah di sekitarnya. Penggunaan teori ini dalam penelitian adalah untuk menilai apakah distribusi fasilitas pendidikan dasar, seperti SD dan SMP, telah sesuai dengan prinsip keterjangkauan pelayanan dalam konteks spasial. Dengan menerapkan *Central Place Theory*, peneliti dapat mengkaji sejauh mana fasilitas pendidikan telah tersebar secara hierarkis dan proporsional terhadap kebutuhan penduduk di sekitarnya, serta mengidentifikasi wilayah yang kekurangan pusat pelayanan pendidikan. Teori ini dianggap lebih kompleks dibandingkan teori lokasi sebelumnya karena mampu menggambarkan lokasi dan struktur hubungan ekonomi dalam konteks aglomerasi wilayah, serta memperhitungkan keseimbangan umum dalam tata ruang.

Central Place Theory dari Christaller (1933) memiliki dua konsep dasar utama, yaitu:

1. *Range of goods or services*, yakni jarak maksimal yang bersedia ditempuh penduduk untuk memperoleh barang atau layanan tertentu.
2. *Threshold*, yaitu jumlah populasi minimum yang diperlukan agar suatu produk atau layanan dapat beroperasi secara ekonomis.

Kedua konsep tersebut akan menentukan hirarki (jenjang orde) dari tempat pusat. Ada hubungan yang sangat erat antara jumlah penduduk pendukung di suatu wilayah dengan tingkatan (hirarki) pusat pelayanan *central place*. Fungsi pokok suatu pusat adalah bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya. Tergantung pada ambang permintaan (*demand threshold*) dan lingkup permintaan (*demand range*) dimana keduanya menentukan besaran tempat sentral (Utami dkk., 2022).



Gambar 2.1 Konsep *Threshold* dan *Range*.
Sumber: Utami dkk., 2022.

2.6 Standar Fasilitas Pendidikan di Indonesia

Lokasi fasilitas publik tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan teknis dan geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan terutama politik. Pada praktiknya, kebijakan penentuan lokasi fasilitas publik sering kali tidak lepas dari kepentingan dan intervensi aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap dinamika politik lokal menjadi penting, karena distribusi fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Tulangbawang diduga tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan non-teknis. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Rusthon (1988) yang menyatakan bahwa faktor politik merupakan variabel penting dalam proses pengambilan keputusan lokasi fasilitas publik. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan fasilitas publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu fasilitas yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan adalah fasilitas pendidikan, khususnya sekolah. Pendidikan berperan sebagai pondasi dasar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Pemerintah memiliki beberapa lembaga/kementrian yang mengatur keberadaan fasilitas pendidikan (sekolah). Peraturan ini secara umum terkait dengan konsep dasar *central place theory* Christaller (1933) yaitu *threshold* dan *range* serta prinsip *neighborhood unit* (Perry, 1929) tentang kedekatan antara fasilitas dan penduduk. Peraturan ketersediaan fasilitas pendidikan menitikberatkan fokus utamanya pada jumlah penduduk pendukung minimal bagi ketersediaan fasilitas dan jarak jangkauan (terdekat) antara fasilitas dengan lokasi penduduk. Beberapa peraturan dari lembaga pemerintahan memiliki kesamaan dan perbedaan standar fasilitas.

1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 543/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Sarana pendidikan memiliki indikator utama berupa jumlah anak usia sekolah yang tertampung. Standar tingkkat pelayanan minimal yang harus tersedia adalah sebagai berikut:
 - a. Satu unit SD untuk setiap 6.000 penduduk.
 - b. Satu unit SLTP untuk setiap 25.000 penduduk.
 - c. Satu unit SLTA untuk setiap 30.000 penduduk.

Standar kualitasnya adalah bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau atau sampah, dan pencemaran lainnya.

2. Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 Mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Perencanaan sarana pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan.
- b. Optimasi daya tampung dengan satu shift.
- c. Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu.
- d. Pemakaian sarana dan prasarana pendukung.
- e. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat.

Kebutuhan program ruang minimum untuk SD, SMP, dan SMA adalah memiliki minimum 6 ruang kelas dengan jumlah 40 murid pada masing-masing kelas yang dilengkapi dengan ruang-ruang lain. Kebutuhan sarana pendidikan masing-masing jenjang pendidikan kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas SD

1. Jumlah penduduk pendukung 1.600 jiwa
2. Radius pencapaian 1.000 meter
3. Berada di tengah kelompok warga
4. Tidak menyeberang jalan raya

b. Fasilitas SMP

1. Jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa
2. Radius pencapaian 1.000 meter
3. Dapat dijangkau oleh kendaraan umum
4. Tidak selalu harus di pusat lingkungan

c. Fasilitas SMA

1. Jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa

2. Radius pencapaian 3.000 meter
 3. Dapat dijangkau oleh kendaraan umum
 4. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
3. Standar Sarana dan Prasana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2007
- a. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
 1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
 2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
 3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
 4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
 - b. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS).
 1. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
 2. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 4000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 4000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.

3. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
 4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
- c. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
 2. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

2.7 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh seseorang yang berkaitan dengan judul, topik dan masalah yang digunakan pada penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

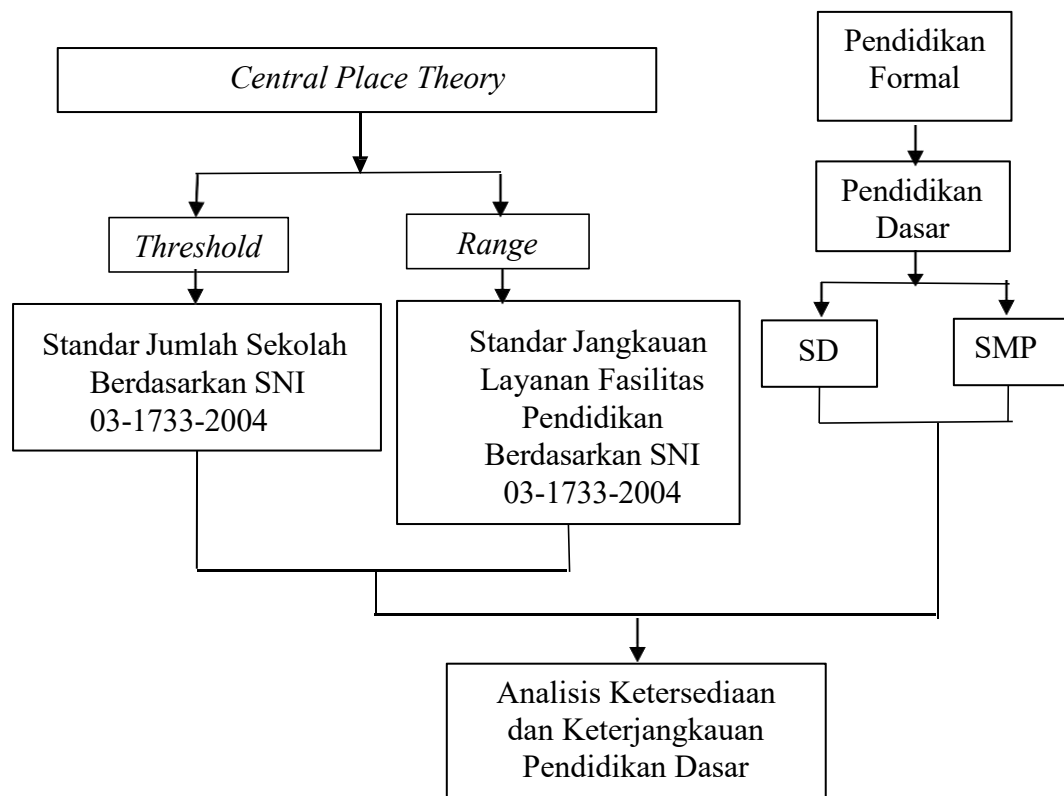
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Kartiko Dhian Pranowo, Rahel Situmorang, Benny Benyamin Suharto (2023)	Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pendidikan serta menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sragen.	Analisis data deskriptif kuantitatif dan analisis spasial.	Fasilitas SD yang masih membutuhkan penambahan 3 unit SD sedangkan SMP dan SMA sudah terpenuhi sebanyak 14 unit. Sementara itu, jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan menunjukkan bahwa beberapa jangkauan pelayanan fasilitas SMP dan SMA berada di kelurahan yang sama/tumpang tindih, sedangkan lokasi fasilitas SD sudah merata tetapi jangkauan pelayanannya secara tumpang tindih.	Metode penelitian yang digunakan dilakukan dengan dua metode analisis, yaitu analisis data deskriptif kuantitatif dan analisis spasial.
2.	Ainun Nurma Ramadhana & Bambang Sriyanto Eko Prakoso (2018)	Menganalisis ketersediaan, pola distribusi dan keterjangkauan fasilitas pendidikan SD dan SMP di Kota Metro.	Pendekatan Kuantitatif. Analisis yang digunakan: analisis Scalogram, seperti Daya Gutman Layan, Scalling, Nearest Neighbour analysis dan Buffer.	Secara keseluruhan Kota Metro belum mampu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakatnya. Pola distribusi spasial fasilitas pendidikan jenjang SD/MI di Kota Metro adalah seragam (<i>dispersed</i>), sedangkan fasilitas pendidikan jenjang SMP/MTs adalah acak (<i>random</i>). Analisis keterjangkauan fasilitas pelayanan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Metro telah mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Kota Metro.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Analisis yang digunakan yaitu analisis data sekunder dan analisis spasial.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
3.	Muhammad Saiful Ruuhulhaq, Bagja Waluya, Shafira Himayah (2024)	Menganalisis ketersediaan dan menganalisis pola sebaran dan keterjangkauan SMP Negeri di Kota Cimahi.	Pendekatan analisis deskriptif, dan Analisis Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis).	Pola persebaran SMA terhadap luas wilayah Kecamatan Koja cukup merata, namun perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan khususnya SMP.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta analisis yang digunakan yaitu analisis data sekunder dan analisis spasial.
4.	Ira Megawati Gunawan Putri & Muhammad Kurniawan (2023)	Memahami dan mendeskripsikan keterjangkauan, pola sebaran titik lokasi SMA/SMK/MA Negeri di Kabupaten Tangerang. Hasilnya menunjukkan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan berbasis spasial. Pendekatan spasial dapat digunakan untuk menilai aksesibilitas dan distribusi sekolah pada tingkat pendidikan lainnya, termasuk pendidikan dasar yang menjadi fokus dalam penelitian ini.	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan spasial.	Analisis keterjangkauan terdapat 76,05% wilayah pemukiman tidak terjangkau lokasi SMA/SMK/MA Negeri di Kabupaten Tangerang, dengan pola sebaran titik lokasi SMA/SMK/MA yang acak.	Penelitian ini berfokus pada ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan dasar negeri, dengan metode kualitatif dan analisis data sekunder.
5.	Prisma Tia Nigrum, Rahma Hayati, Erni Suharini, Ariyani Indrayati (2025)	Menganalisis pola distribusi SMA negeri, menganalisis keterjangkauan SMA negeri, mengevaluasi ketersediaan SMA negeri di Kota Semarang. Pentingnya evaluasi spasial dalam menentukan apakah jumlah dan lokasi sekolah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang juga relevan dalam konteks pendidikan dasar di Kabupaten Tulangbawang.	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan spasial.	Pola sebaran SMA Negeri di Kota Semarang menunjukkan pola seragam/reguler/tersebar, keterjangkauan berdasarkan peraturan zonasi menghasilkan seluruh kecamatan di Kota Semarang terjangkau, ketersediaan fasilitas sekolah hanya tiga dari 16 kecamatan yang memiliki tingkat surplus.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pengukuran pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan, keterjangkauan dan persebaran lokasi fasilitas pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan zonasi.

2.8 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir analisis ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan fasilitas pendidikan dasar dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.

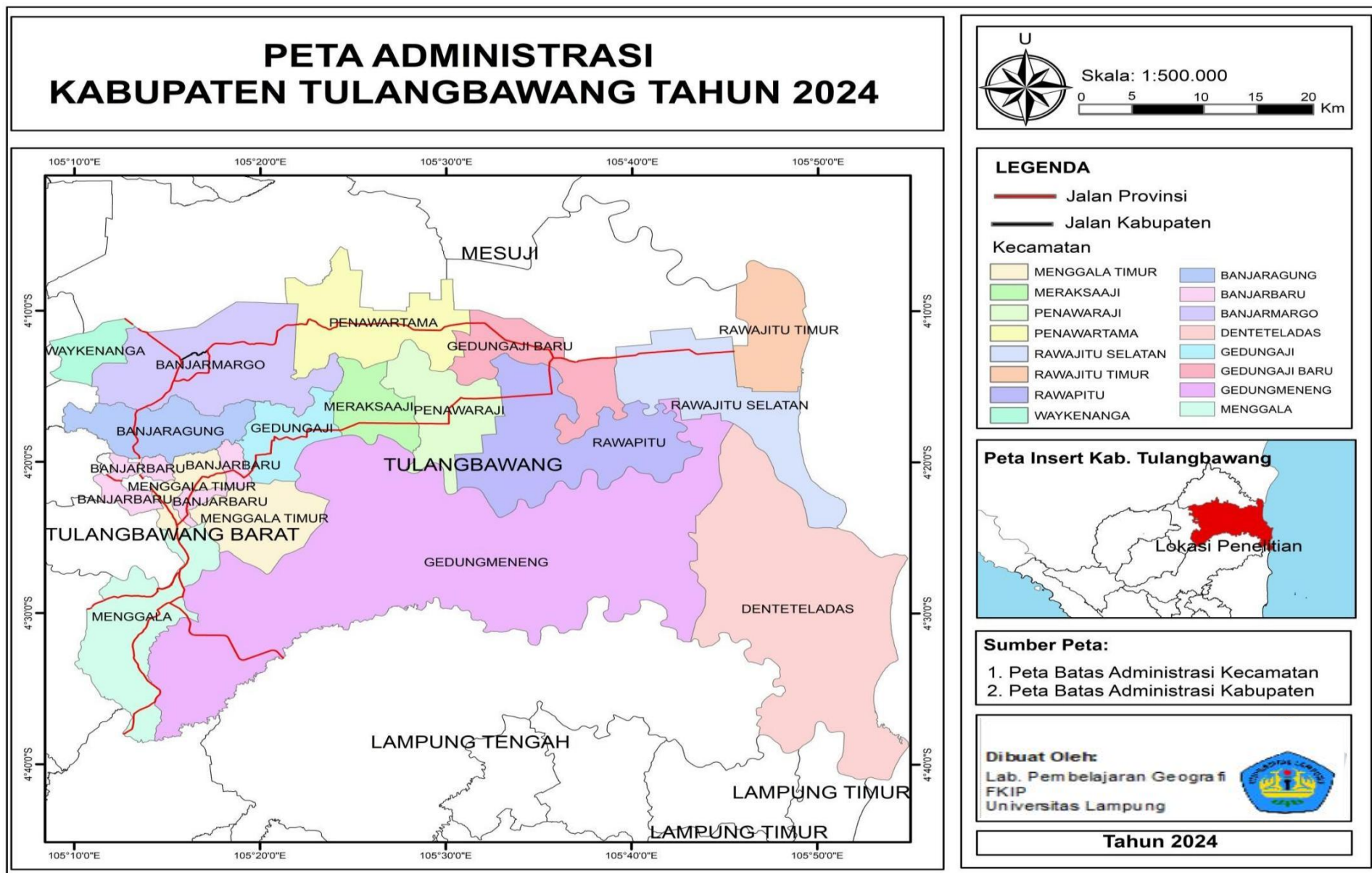
III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan sistematis untuk mencari kebenaran ilmiah, dimulai dari perumusan masalah hingga analisis dan penarikan kesimpulan, dengan merujuk pada studi terdahulu (Sahir, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh penulis berperan sebagai instrumen utama dalam penyusunan laporan penelitian.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung. Kabupaten Tulangbawang dipilih karena memiliki persebaran penduduk dan fasilitas pendidikan dasar yang belum merata. Adapun objek penelitian dalam studi ini adalah fasilitas pendidikan dasar negeri, yaitu SD dan SMP Negeri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulangbawang. Objek penelitian merupakan fokus utama dalam penelitian karena memiliki atribut yang relevan dengan variabel yang dikaji (Sugiyono, 2021). Titik lokasi SD dan SMP negeri dianalisis untuk menilai distribusi spasial, keterjangkauan dari permukiman penduduk, serta kesesuaiannya dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan, karena sebaran sekolah yang tidak merata dapat memengaruhi akses dan pemerataan pendidikan dasar.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulangbawang.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2021) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu pelayanan pendidikan dasar negeri. Variabel ini terdiri dari tiga aspek utama, yaitu standar jumlah sekolah (untuk mengukur ketersediaan), distribusi spasial, dan keterjangkauan (yang mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap sekolah dasar negeri). Adapun indikator yang digunakan pada variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel sangat berguna dalam mengoperasionalkan variabel agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati. Berikut ini definisi variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi Variabel	Indikator	Cara Pengukuran
Pelayanan Pendidikan Dasar Negeri	1. Standar Jumlah Sekolah	1. Jumlah Penduduk 2. Jumlah Sekolah <i>Existing</i> 3. Standar Kebutuhan Sekolah Menurut SNI 03-1733-2004	Perbandingan antara jumlah sekolah <i>existing</i> dengan kebutuhan berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 TM = <i>Existing</i> < Standar M = <i>Existing</i> = Standar
	2. Sebaran Spasial	<i>Plotting</i> titik lokasi sekolah dasar dan menengah pertama pada peta.	Pemetaan titik lokasi SD dan SMP negeri menggunakan SIG untuk melihat pola persebaran spasial tiap kecamatan.
	3. Keterjangkauan	Jarak sekolah ke permukiman (SD = 1000 meter, SMP = 1000 meter) berdasarkan SNI 03-1733-2004.	Analisis spasial menggunakan buffer 1000 meter.

Sumber: Tinjauan pustaka, 2025

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa definisi operasional variabel untuk penelitian mengenai pelayanan pendidikan dasar negeri mencakup tiga aspek utama yaitu standar jumlah sekolah, distribusi spasial, dan keterjangkauan. Pada penelitian ini, ketersediaan sekolah dasar negeri diturunkan menjadi variabel operasional berupa standar jumlah sekolah, yang mengacu pada perbandingan antara jumlah sekolah existing dengan jumlah kebutuhan menurut SNI 03-1733-2004.

1. Jumlah penduduk: merupakan dasar dalam menentukan kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan akan sekolah dasar negeri (Sari & Prasetyo, 2021).
2. Jumlah sekolah *existing*: data sekolah yang ada digunakan untuk mengevaluasi apakah jumlah sekolah yang ada saat ini sudah mencukupi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk.
3. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan: peraturan ini sebagai acuan dalam menetapkan standar ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar.
4. Kriteria pemenuhan kebutuhan sekolah: evaluasi dilakukan dengan membandingkan jumlah sekolah *existing* dengan standar yang ditetapkan. Jika jumlah sekolah kurang dari standar, maka dikategorikan sebagai TM (tidak memenuhi). Sebaliknya, jika jumlah sekolah sama dengan standar, maka dikategorikan sebagai M (memenuhi).
5. Sebaran spasial: plotting lokasi SD dan SMP negeri pada peta digunakan untuk melihat distribusi geografis fasilitas pendidikan dasar di setiap kecamatan, sehingga dapat dianalisis kesesuaian persebarannya terhadap kebutuhan dan sebaran penduduk.
6. Aksesibilitas atau jangkauan sekolah terhadap permukiman : berdasarkan acuan yang digunakan yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa jarak maksimal yang harus ditempuh oleh siswa dari tempat tinggal ke fasilitas pendidikan adalah 1.000 meter.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada sebuah penelitian. Penelitian data dilakukan untuk maksud memperoleh bahan-bahan keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya (Barlian, 2018). Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur, dokumentasi, dan survei laman internet. Studi literatur dilakukan dengan pencarian teori dan data-data terkait Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulangbawang, studi, hasil penelitian, dan sebagainya. Survei laman internet dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang tidak tercetak dalam bentuk fisik berupa jurnal, karya ilmiah, artikel dan publikasi lainnya. Pengumpulan data juga diperoleh melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang untuk menemukan data yang akurat.

Pengumpulan data sekunder sangat membantu dalam memperoleh gambaran umum mengenai kondisi wilayah, jumlah penduduk, dan penyebaran fasilitas pendidikan yang menjadi objek kajian. Data spasial seperti peta administrasi dan peta jaringan jalan diperoleh dari instansi yang berwenang dan digunakan untuk mendukung analisis dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Selain itu, dokumen peraturan, pedoman teknis seperti SNI 03-1733-2004, serta peraturan perundang-undangan juga dijadikan rujukan untuk menilai ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar secara normatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai kegiatan mengolah, membahas, dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran, serta kesimpulan tertentu dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Analisis dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna (Ibrahim, 2015). Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data sekunder dan analisis keruangan.

1. Analisis Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain, bukan peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini biasanya telah tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, arsip, atau publikasi dari lembaga tertentu, dan digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Analisis data sekunder adalah proses menganalisis data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, observasi, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya (Sugiyono, 2021). Data sekunder diperoleh dari badan instansi penyedia data yang terkait, maupun studi pustaka yang menunjang penelitian. Kebutuhan data sekunder dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Kebutuhan Data Sekunder

No	Data	Jenis Data	Instansi/Penyedia Data
1.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	BPS Kabupaten Tulangbawang
2.	Pendidikan	Jumlah Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang

Sumber: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024
2. BPS Kabupaten Tulangbawang Tahun 2024

Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kebutuhan data sekunder penelitian ini memanfaatkan data sekunder untuk mendukung analisis pelayanan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tulangbawang.

2. Analisis Spasial

Analisis spasial mencakup semua transformasi, manipulasi, dan metode yang diterapkan pada data geografis untuk menambah nilai, mendukung pengambilan keputusan atau mengungkap pola yang tidak langsung terlihat (Longley et al., 2015). Penelitian ini menggunakan analisis spasial untuk mengkaji persebaran jumlah sekolah di Kabupaten Tulangbawang serta keterjangkauan akses masyarakat ke sekolah-sekolah tersebut berdasarkan jarak (*range*).

Pemetaan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Langkah-langkah analisis spasial dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data Lokasi Sekolah

Titik koordinat lokasi sekolah negeri di Kabupaten Tulangbawang diperoleh dari hasil *geocoding* alamat sekolah menggunakan *google earth*.

2. Pemetaan Sekolah

Titik-titik lokasi sekolah diplot pada peta administrasi Kabupaten Tulangbawang untuk menampilkan persebaran jumlah sekolah di setiap kecamatan.

3. *Overlay* dengan Data Permukiman

Data persebaran penduduk atau desa digunakan untuk melihat daerah mana yang memiliki keterjangkauan rendah terhadap sekolah (*buffer area*).

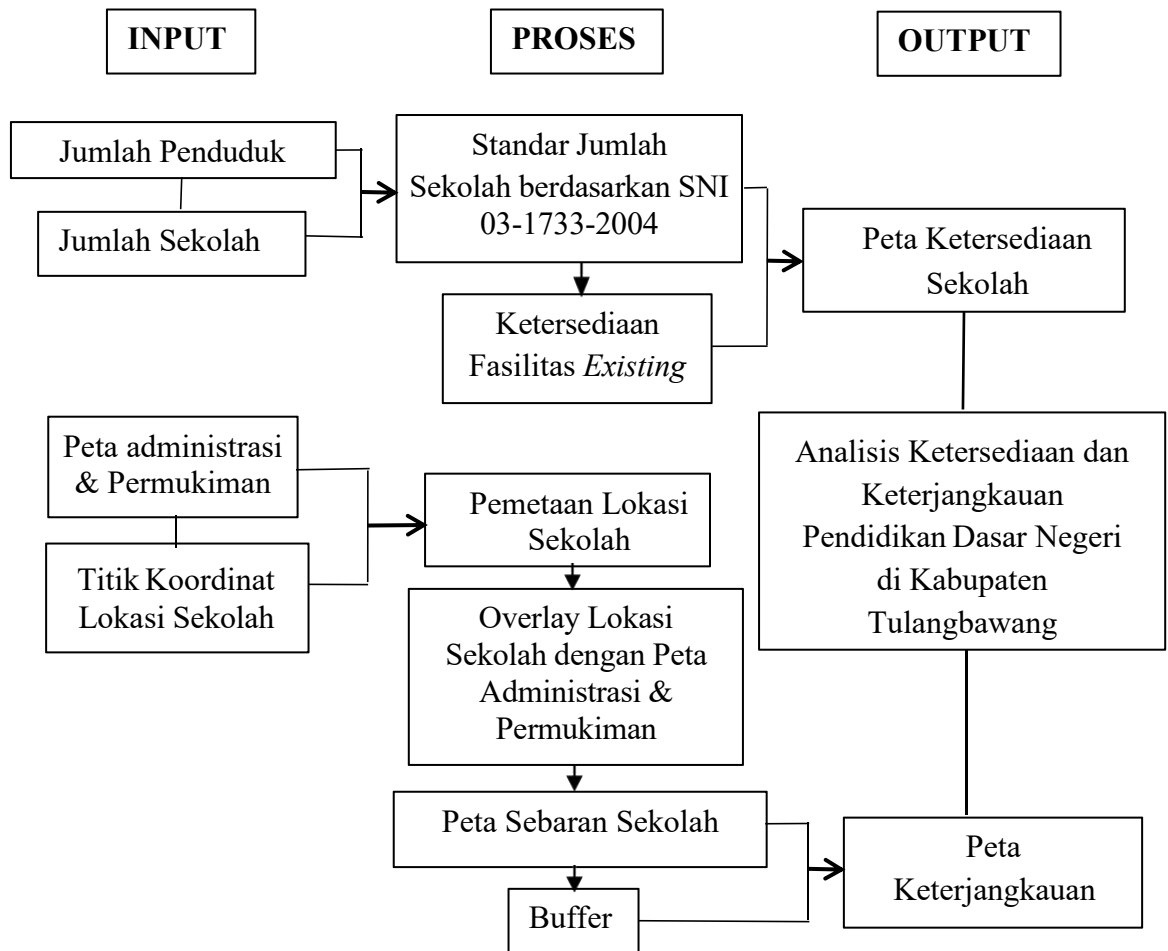
4. Analisis *Buffer* (Jarak tempuh)

Digunakan metode *buffer zone* (penyangga) untuk mengukur radius tertentu (1000 meter) dari tiap sekolah. Hal ini merujuk pada standar SNI 03-1733-2004, bahwa jarak ideal antara tempat tinggal dengan fasilitas pendidikan adalah 1000 meter.

5. Analisis Ketimpangan Persebaran

Melalui perbandingan antara lokasi sekolah dasar dengan sebaran permukiman penduduk di setiap kecamatan, dapat dianalisis wilayah mana yang mengalami kekurangan maupun kelebihan ketersediaan sekolah.

3.6 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Ketersediaan Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) di Kabupaten Tulangbawang secara umum masih belum memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan standar SNI 03-1733-2004. Dari total kebutuhan 280 SD, baru tersedia 158 sekolah, sehingga masih terdapat kekurangan 122 sekolah. Kekurangan ini terjadi di seluruh kecamatan tanpa ada satu pun kecamatan yang sepenuhnya memenuhi standar. Untuk SMP, jumlah yang tersedia sebanyak 55 sekolah juga belum memadai, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, ketersediaan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Tulangbawang masih belum ideal.
2. Sebaran spasial SD Negeri di Kabupaten Tulangbawang cenderung mengikuti konsentrasi penduduk, dengan jumlah lebih banyak di kecamatan padat seperti Banjar Agung, Banjar Baru, dan Menggala, serta lebih sedikit di wilayah luas berpenduduk rendah seperti Gedung Meneng, Rawajitu Timur, dan Dente Teladas. SMP Negeri sudah ada di semua kecamatan, namun jumlahnya tidak merata, lebih banyak di daerah perkotaan seperti Menggala dan Banjar Agung, dan minim di wilayah seperti Dente Teladas, Rawapitu, dan Gedung Aji Baru. Kondisi ini menunjukkan distribusi sekolah masih terpusat di wilayah padat penduduk, sehingga diperlukan kebijakan pemerataan akses pendidikan dasar.

3. SD Negeri telah menjangkau sekitar 50,09% wilayah permukiman dengan radius pelayanan 1 km. Beberapa kecamatan seperti Meraksa Aji, Banjar Agung, dan Gedung Aji memiliki cakupan di atas 80%, menunjukkan kondisi yang relatif baik. Namun, kecamatan seperti Rawapitu dan Rawajitu Timur memiliki cakupan sangat rendah, yang berarti banyak permukiman berada di luar jangkauan ideal sekolah. Untuk SMP Negeri, tingkat keterjangkauan jauh lebih rendah, yaitu hanya menjangkau sekitar 12,22% wilayah permukiman. Sebagian besar kecamatan memiliki cakupan di bawah 40%, bahkan beberapa seperti Banjar Margo dan Rawapitu hanya menjangkau kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan SMP menjadi permasalahan yang lebih mendesak dibandingkan SD.

5.2 Saran

Secara umum yang dapat diberikan adalah bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu arahan dalam distribusi fasilitas pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan terhadap masyarakatnya yang merata dan dapat diakses dengan mudah. Sehingga, proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, optimal dan merata dengan:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pemerataan pembangunan sekolah dasar negeri, khususnya di wilayah yang teridentifikasi masih memiliki keterbatasan akses atau jangkauan pelayanan pendidikan dasar.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang disarankan untuk mengintegrasikan pemetaan sebaran sekolah dasar ke dalam sistem informasi berbasis geospasial, guna mempermudah identifikasi wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal.
3. Penelitian ini hanya membahas dari sisi jumlah sekolah dan jarak jangkauan terhadap peserta didik, sehingga belum mencakup aspek kualitas layanan pendidikan seperti jumlah ruang kelas, ketersediaan guru,

sarana pembelajaran, dan kondisi bangunan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih komprehensif, termasuk faktor-faktor internal sekolah analisis pelayanan pendidikan dasar menjadi lebih utuh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baja, S. 2012. *Perencanaan tata guna lahan dalam pengembangan wilayah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Barlian, E. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Hasbullah. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, M. A. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Perry, C.A. 1929. The Neighborhood unit: a scheme of arrangement for the family-life community. *Monograph one in Neighborhood and Community Planning. Vol. VII. The Regional Survey of New York and Its Environs*. Pp 22-140. New York: Regional Plan of New York and Its Environs.
- Sahir, S. H. 2021. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Utami, R. K. S., Khakhim, N., Jatmiko, R. H., & Kurniawan, A. 2022. *Teori Lokasi Fasilitas Publik Telaah Teori Lokasi Fasilitas Pendidikan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

JURNAL

- Bujuri, A. P., Pargito, P., & Sudarmi, S. 2015. Pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap prestasi belajar geografi sma swadhipa. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 3(1).
- Cahyani, N. D., Fajriyanto, F., & Tridawati, A. 2025. Analisis spasial persebaran sekolah berdasarkan keterjangkauan dan kenyamanan termal menggunakan SIG di Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara. *Datum: Journal of Geodesy and Geomatics*, 5(1), 23–34.
- Darmawati, S., Sudjarwo, S., & Pargito, P. 2013. Pendidikan Karakter Terintegrasi Pembelajaran Ekonomi. *Jurnal Studi Sosial*, 1(3), 41000.
- Firmansyah, F. 2013. Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun Di Indonesia Periode 1994-2008. *Avatara e-journal pendidikan sejarah*, 1.

- Gunawan Putri, I. M., & Kurniawan, M. 2023. Analisis Keterjangkauan dan Pola sebaran SMA/SMK/MA Negeri di Kabupaten Tangerang Menggunakan Nearest Neighbor Analysis. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, 6(1), 74-85.
- Hansen, W. G. 1959. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2), 73–76.
- Hardisanti, M., & Trihantoyo, S. 2021. Implementasi Wajib Belajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal BK UNESA*, 11(2), 137-145.
- Herlina, M., Widodo, S., & Tardiyansah, R. 2024. Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing. *geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*, 5(2), 127-136.
- Kahar, S., & Wijaya, A. P. 2015. Analisis Daya Tampung Fasilitas Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 105-111.
- Kurniasih, R. 2020. Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Daerah Tertinggal: Studi Kasus di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 8(2), 115–126
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. 2015. *Geographic Information Systems and Science (4th ed.)*. Wiley.
- Nigrum, P. T., Hayati, R., Suharini, E., & Indrayati, A. 2025. Evaluasi keterjangkauan dan ketersediaan SMA negeri berdasarkan sistem zonasi PPDB Provinsi Jawa Tengah tahun 2023/2024 di Kota Semarang. *Jurnal Spasial*, 12(1).
- Nurhasanah, E., & Haryanto, D. 2021. Keterjangkauan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pemerataan Akses Sekolah di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Geografi dan Pendidikan*, 14(1), 51–60.
- Putra, H. S., & Kahar, F. 2021. Analisis spasial sebaran ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Bombana. *PSGR: Planning and Sustainable Growth Research Journal*, 1(1), 18–28.
- Putri, H. P. D. 2023. Peran Pendidikan Dasar dalam Pembentukan Dasar Kemampuan Anak di SD Negeri 6 Wonogiri. Pendidikan Dasar dan Manajemen Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 4(1), 11-16.
- Pranowo, K. D., Situmorang, R., & Suharto, B. B. 2023. Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Sragen. *REKA RUANG*, 6(1), 14-21.
- Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. 2022. Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8.

- Ramadhana, A. N., & Prakoso, B. S. E. 2018. Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kota Metro. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(3).
- Ridwana, R., Subakti, G., Dewanti, N. P., & Juwono, P. T. 2022. School location analysis by integrating the accessibility, natural and biological hazards to support equal access to education. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 6(2), 281–298.
- Rini, N. S. 2018. Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.
- Rusthon, G., 1988. The roepke lecture in economic geography location theory, location-allocation models, and service development planning in the third world. *Economic Geography*, 64(2), p. 97-120.
- Ruuhulhaq, M. S., Waluya, B., & Himayah, S. 2024. Analisis Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kota Cimahi. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(2), 227-238.
- Sari, P. D., & Prasetyo, L. B. 2021. Analisis daya layan dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu. *Geo Image: Jurnal Kajian Informasi Geospasial*, 10(1), 17–25.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suharto, D., & Nugroho, S. 2022. Evaluasi distribusi sekolah dasar berdasarkan kebutuhan wilayah menggunakan analisis jarak. *Jurnal Kajian Wilayah dan Perkotaan*, 9(2), 101–110.
- Uang, O. L., Rengkung, M. M., & Sembel, A. S. 2017. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTP di Kecamatan Mapanget. *Spasial*, 4(3), 234-244.
- Wahidah, S., & Adhar, I. 2024. Hakikat Manusia dan Pengembangannya Melalui Pendidikan. *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(1), 99-110.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

- Badan Pusat Statistik. 2023. Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Tulang Bawang.
- Bappenas. 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Bidang Pendidikan. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 543/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004, Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.